

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief. Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam PenanggulanganKejahatan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Friedman. Lawrence M., *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Hamzah. Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Heniarti. Dini Dewi, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Husin. Kadri, *Penelitian Terhadap Efektivitas Undang-Undang*. Lampung, 1998.
- Maringka. Jan S., *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Marpaung. Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Bagian Pertama, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Muhammad. Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Purbacaraka. Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1993.
- Rahardjo. Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 1991.
- Rahardjo. Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum dalam suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Rizanizarli. Riza Chatias & Airi Safrijal, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Banda Aceh: FH UNMUHA Press, 2017.
- Sagala. Parluhutan, *Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*, Jakarta, 2016.
- Salam. Moch. Faisal, *Peradilan Militer di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-2, 1986.

- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soekanto. Soerjono, *Di beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2003.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, 1987.
- Suseno. Frans Magnis, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987.
- Waluyo. Bambang, *Hukum Pidana Dan Peradilan Pidana*, LPPM Press UPN Veteran Jakarta, 2023.
- Wignyosoebroto. Soetandyo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial*, terjemahan dari CG Howard dan RS Munnner, *Law, is nature and limits*, New Jersey Hall, 1975.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor : Kep/10/M/XII/1983 – Nomor : M.57.PR.09.03 Tahun 1993 tanggal 29 Desember 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas

Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dan TNI Nomor KPK 08/TNI-KPK/VIII/2005 dan Nomor Mabes TNI : KERMA/3/VIII/2005 tentang Kerja Sama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal

Lapae. Kelaesar Anna Hasanah, Hambali Thalib & Nur Fadhillah Mappaselleng, Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.3, No. 9, September 2022.

Mawarni. Yusnita, *Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2, 2018.

Prabandari. Putu Nadya, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas, *Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2022*.

Syamsuddin. A. Kajian tentang anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perkara Koneksitas Menurut Kuhap. *Lex Crimen*, Volume 6, Nomor 6, 2017.

Seminar

Manan. Bagir, *Penegakan Hukum dalam Perkara Pidana*, disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tanggal 20 Januari 2010

Internet

Asshiddiqie. Jimly, *Makalah Penegakan Hukum*, PDF Created with deskPDF PDF Writer-Trial:<http://www.docustack.com>.

Fuadi. Ahmad Rifki, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Pemasalahannya*, diakses dari <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/227->

kompetensi-absolut-peradilan- agama-dan-permasalahannya, pada tanggal 2 April 2022, pukul 21.31 WIB.

<https://antikorupsi.org/id/news/peradilan-koneksitaskasus-korupsi> diakses pada tanggal 21 November 2023 pada pukul 08.00 WIB.

<https://indonesiana.tempo.co/read/107001/2017/01/18/emerson/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi-emersonyuntho> diakses pada tanggal 21 November 2023 Pukul 09.25 WIB.

Peradilan koneksitas kasus korupsi, online tersedia di <https://antikorupsi.org/id/article/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi>

Sagala. Parluhutan, *Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*. Diakses melalui <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas.pdf>, tanggal 10 Desember 2023.

Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Muhammad Rizal, Jabatan Jampidmil, Jakarta, 8 Maret 2024

Wawancara dengan Donny Dortmund selaku hakim, Jakarta, 5 Februari 2024